

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM  
PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA OEPUAH  
SELATAN KECAMATAN BIBOKI MOENLEU  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)**



**OLEH**

**HENDRIKA ROMANA**  
**NPM: 22190021**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TIMOR  
KEFAMENANU  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM  
PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA OEPUAH**

**SELATAN KECAMATAN BIBOKI MOENLEU**

**KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**Disusun Oleh:**

**Nama : Hendrika Romana**

**NPM : 22190021**

**Program Studi : Ilmu Administrasi Negara**

**Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas : Timor**

**Disetujui Pada Tanggal : 21 November 2023**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. AP. Aplonia Pala, S.Sos., MM**

**Stefanus Bekun, S.Sos., M.AP**

**NIP : 19731122 202121 2 002**

**NIP : 19790728202121 1 007**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Timor**



**Dr. AP. Aplonia Pala, S.Sos., MM**  
**NIP : 19731122 202121 2 002**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM  
PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA OEPUAH**

**SELATAN KECAMATAN BIBOKI MOENLEU**

**KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

Disusun Oleh:

**HENDRIKA ROMANA**

**NPM : 22190021**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan dewan penguji pada

Hari : Selasa  
Tanggal : 21 November 2023  
Tempat : Ruang AN1  
Waktu : 11.00-12.30

Susunan Dewan Penguji:

1. **Agustinus Longa Tiza, S.Sos., M.AP** (.....)  
(Ketua)
2. **Stefanus Bekun, S.Sos., M.AP** (.....)  
(Sekretaris)
3. **Dr. AP. Aplonia Pala, S.Sos., MM** (.....)  
(Anggota)

Mengetahui

**Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Yoakim Bembi, S.Sos., M.AP**  
**NIP : 198504162019031009**

## PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini dengan judul : **PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA OEPUAH SELATAN KECAMATAN BIBOKI MOENLEU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah SKRIPSI ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia SKRIPSI ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh Sarjana Sosial (S.Sos) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Kefamenanu, 21 November 2023  
Mahasiswa,



Nama : Hendrika Romana  
NPM : 22190021  
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

## **MOTTO**

“Setialah dalam perkara kecil dan lakukanlah semuanya dengan cinta”.

***(Rini)***

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Dominikus Berek dan Mama Kornelia Tulasi yang telah mendukung penulis dengan penuh cinta kasih dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Kakak tercinta Rian Tulasi, adik tercinta Rando Tulasi dan semua keluarga yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini;
3. Almamater tercinta Universitas Timor.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA OEPUAH SELATAN KECAMATAN BIBOKI MOENLEU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bimbingan dan bantuan dari pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P. Selaku Rektor Universitas Timor yang telah memberikan kesempatan untuk menyusun skripsi ini.
2. Dr. A. P. Aplonia Pala, S.Sos., MM. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus pembimbing utama yang dengan sabar membimbing dan mendampingi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Yoakim Rembu, S.Sos., M.AP. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ijin dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Stefanus Bekun, S.Sos, M.AP. Selaku pembimbing pendamping yang dengan sabar dan tulus memberikan koreksi yang membangun serta terus

mengasah dan mempertajam penulis demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Agustinus Longa Tiza, S.Sos., M.AP. Selaku dosen penguji yang memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkhusus Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah membekali penulis selama perkuliahan.
7. Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya program studi Ilmu Administarsi Negara Universitas Timor yang membantu dalam hal administrasi.
8. Kedua orangtua dan saudara-saudari yang memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan dapat skripsi ini.
9. Teman-teman Ilmu Administrasi Negara angkatan 2019 yang telah memberikan sumbangan pikiran baik secara langsung maupun tidak langsung dengan caranya masing-masing memberikan masukan yang baik selama penulis menimbah ilmu di Universitas Timor.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Kefamenanu, Februari 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Pengertian Peran .....	12
2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	14
2.2.1 Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	18
2.2.2 Hak Dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	21
2.3 Peraturan Desa.....	23
2.3.1 Pengertian Peraturan Desa .....	23
2.3.2 Proses Penyusunan Peraturan Desa.....	28
2.3.3 Fungsi Pembentukan Peraturan Desa.....	32
2.4 Pemerintahan Desa .....	34
2.4.1 Pengertian Desa.....	34
2.4.2 Pemerintahan Desa.....	35
2.4.3 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	37
2.5 Penelitian Terdahulu.....	40
2.6 Kerangka Berpikir .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	46
3.2 Fokus Penelitian .....	46
3.3 Sumber Data.....	47
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.5 Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	52

4.1.1 Keadaan Geografis .....	52
4.1.2 Keadaan Penduduk .....	54
4.2 Penyajian Data Fokus .....	59
4.2.1 Kebijakan .....	59
4.2.2 Strategi .....	61
4.2.3 Komunikasi .....	62
4.3 Pembahasan .....	64
4.3.1 Kebijakan .....	64
4.3.2 Strategi .....	67
4.3.3 Komunikasi .....	67
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
5.1 Simpulan .....	69
5.2 Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nama-Nama Anggota BPD Desa Oepuah Selatan Tahun 2022 .....	7
Tabel 1.2 Perdes Desa Oepuah Selatan Tahun 2022.....	8
Tabel 1.3 Rancangan Perdes Desa Oepuah Selatan Tahun 2023.....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	40
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Oepuah Selatan Tahun 2022.....	54
Tabel 4.2 Nama-Nama Anggota BPD Di Desa Oepuah Selatan Tahun 2022 .....	54
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Oepuah Selatan Menurut Usia Tahun2022.....	55
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Desa Oepuah Selatan Berdasarkan Agama Tahun 2022 .....	56
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Desa Oepuah Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022 .....	56
Tabel 4.6 Mata Pencarian Penduduk Desa Oepuah Selatan Tahun 2022 .....	58
Tabel 4.7 Rancangan Peraturan Desa Di Desa Oepuah Selatan Tahun 2023 .....	64
Tabel 4.8 Perdes Desa Oepuah Selatan Tahun 2022.....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	45
Gambar 3.1 Skema Model Interaktif Milles Dan Huberman .....	51

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I Surat Ijin Penelitian

Lampiran II Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran III Pedoman Wawancara

Lampiran IV Dokumentasi Penelitian

## ABSTRAK

Hendrika Romana, 22190021 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Oepuah Selatan Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara. Dibimbing oleh pembimbing utama Dr.A.P. Aplonia Pala,S.Sos.,MM dan pembimbing pendamping Bapak Stefanus Bekun, S.Sos.,M.AP. Penelitian ini dilatar belakangi oleh peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam proses penyusunan peraturan desa di Desa Oepuah Selatan di mana setiap tahapan penyusunan peraturan desa selalu melibatkan peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sehingga peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan desa di Desa Oepuah Selatan Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan desa di Desa Oepuah Selatan yang *pertama*, kebijakan dalam hal ini proses pembuatan peraturan desa yang ada di Desa Oepuah Selatan selalu diawali dengan menganalisis situasi atau melihat masalah-masalah yang ada di Desa kemudian disusun dan dibahas bersama namun dalam proses penyusunan peraturan desa mengalami kendala sehingga peraturan belum disahkan menjadi suatu peraturan yang sah. *Kedua*, strategi yang dilakukan oleh BPD Desa Oepuah selatan yaitu melihat masalah-masalah yang ada dan mengumpulkan masyarakat untuk melakukan musyawarah bersama bertujuan untuk masyarakat menyampaikan keluhan atau masalah yang dihadapi. *Ketiga*, komunikasi yang dilakukan antara BPD dengan masyarakat Desa Oepuah Selatan itu bersifat terbuka dilihat dari BPD melakukan musyawarah dusun selalu di forum terbuka. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *pertama*, kebijakan yang dibuat oleh BPD Desa Oepuah Selatan belum disahkan menjadi sebuah peraturan yang sah tetapi masih dalam bentuk rancangan. *Kedua*, strategi yang dilakukan oleh BPD Desa Oepuah Selatan dalam penyusunan peraturan desa melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa. *Ketiga*, komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa bersama pemerintah desa dalam penyusunan peraturan desa bersifat interen sedangkan komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa bersama masyarakat bersifat terbuka.

**Kata kunci: Peran, Peraturan, Desa**

## **ABSTRACT**

*Hendrika Romana, 22190021 Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of Timor. The Role of the Village Consultative Body (BPD) in Preparing Village Regulations in South Oepuah Village, Biboki Moenleu District, North Central Timor Regency. Guided by the main supervisor Dr.A.P. Aplonia Pala, S.Sos., MM and co-supervisor Mr. Stefanus Bekun, S.Sos., M.AP. This research is motivated by the role of the Village Consultative Body (BPD) as a working partner of the village government in the process of drafting village regulations in Oepuah Selatan Village, where every stage of drafting village regulations always involves the role of the Village Consultative Body (BPD). So village regulations are village level statutory regulations that are determined by the village head after being discussed and agreed upon with the Village Consultative Body (BPD). The aim of this research is to determine the role of the Village Consultative Body (BPD) in drafting village regulations in Oepuah Selatan Village, Biboki Moenleu District, North Central Timor Regency. This research is a qualitative descriptive study. The results of this research show that the role of the Village Consultative Body (BPD) in drafting village regulations in South Oepuah Village is the first policy, in this case the process of making village regulations in South Oepuah Village, always begins with analyzing the situation or looking at the problems that exist in the village. The village was then drafted and discussed together, but in the process of drafting village regulations there were obstacles so that the regulations had not been ratified into valid regulations. Second, the strategy carried out by the South Oepuah Village BPD is to look at the existing problems and gather the community to hold joint deliberations aimed at the community conveying complaints or problems they are facing. Third, the communication carried out between the BPD and the people of South Oepuah Village is open, as seen from the BPD always holding hamlet deliberations in an open forum. This research can conclude that first, the policy made by the South Oepuah Village BPD has not yet been ratified into a valid regulation but is still in draft form. Second, the strategy carried out by the South Oepuah Village BPD in drafting village regulations through hamlet deliberations and village deliberations. Third, communication between the Village Consultative Body and the village government in drafting village regulations is internal, while communication between the Village Consultative Body and the community is open.*

**Keywords: Role, Village, Regulation**